



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke

Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 6.494.711.413.219,80 berkurang sejumlah Rp 717.786.164.760,45 sehingga menjadi Rp 5.776.925.248.459,35 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Semula | Rp | 6.130.178.110.468,18 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(660.732.781.304,25)</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp | 5.469.445.329.163,93 |

2. Belanja

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Semula | Rp | 6.494.711.413.219,80 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(717.786.164.760,45)</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp | <u>5.776.925.248.459,35</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp | <u>(307.479.919.295,42)</u> |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 543.163.302.751,62 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(118.093.383.456,20)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp | 425.069.919.295,42 |

b. Pengeluaran

| | | |
|--|----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 178.630.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(61.040.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | <u>117.590.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan | Rp | <u>307.479.919.295,42</u> |

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 1

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pendapatan | 6.130.178.110.468,18 | 5.469.445.329.163,93 | (660.732.781.304,25) | (12,08) |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 2.163.742.926.278,18 | 1.726.122.874.050,54 | (437.620.052.227,64) | (25,35) |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 1.888.896.005.058,00 | 1.523.069.769.979,00 | (365.826.235.079,00) | (24,02) |
| 1.1.2. | Hasil Retribusi Daerah | 39.906.473.350,01 | 32.999.671.755,00 | (6.906.801.595,01) | (20,93) |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 99.880.255.777,75 | 101.460.382.142,49 | 1.580.126.364,74 | 1,56 |
| 1.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 135.060.192.092,42 | 68.593.050.174,05 | (66.467.141.918,37) | (96,90) |
| 1.2. | Dana Perimbangan | 2.573.597.467.000,00 | 2.388.804.740.702,00 | (184.792.726.298,00) | (7,74) |
| 1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 86.659.336.000,00 | 119.851.434.669,00 | 33.192.098.669,00 | 27,69 |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | 1.359.606.514.000,00 | 1.234.516.326.000,00 | (125.090.188.000,00) | (10,13) |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 1.127.331.617.000,00 | 1.034.436.980.033,00 | (92.894.636.967,00) | (8,98) |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 1.392.837.717.190,00 | 1.354.517.714.411,39 | (38.320.002.778,61) | (2,83) |
| 1.3.1. | Pendapatan Hibah | 8.853.500.000,00 | 7.533.500.000,00 | (1.320.000.000,00) | (17,52) |
| 1.3.4. | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 1.383.204.198.000,00 | 1.346.204.195.221,39 | (37.000.002.778,61) | (2,75) |
| 1.3.5. | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 780.019.190,00 | 780.019.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 6.130.178.110.468,18 | 5.469.445.329.163,93 | (660.732.781.304,25) | (12,08) |
| 2. | Belanja | 6.494.711.413.219,80 | 5.776.925.248.459,35 | (717.786.164.760,45) | (12,43) |
| 2.1. | Belanja Tidak Langsung | 3.867.254.822.813,80 | 3.804.188.184.581,72 | (63.066.638.232,08) | (1,66) |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 1.709.790.268.636,40 | 1.524.265.277.489,00 | (185.524.991.147,40) | (12,17) |
| 2.1.3. | Belanja Subsidi | 83.066.925.534,00 | 78.044.866.828,00 | (5.022.058.706,00) | (6,43) |
| 2.1.4. | Belanja Hibah | 790.599.679.410,40 | 751.144.104.600,00 | (39.455.574.810,40) | (5,25) |
| 2.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 2.492.000.000,00 | 2.492.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes | 769.906.467.540,60 | 657.760.900.893,00 | (112.145.566.647,60) | (17,05) |
| 2.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes | 496.550.178.175,00 | 404.430.889.886,00 | (92.119.288.289,00) | (22,78) |
| 2.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 14.849.303.517,40 | 386.050.144.885,72 | 371.200.841.368,32 | 96,15 |
| 2.2. | Belanja Langsung | 2.627.456.590.406,00 | 1.972.737.063.877,63 | (654.719.526.528,37) | (33,19) |
| 2.2.1. | Belanja Pegawai | 103.907.107.262,80 | 98.507.330.130,15 | (5.399.777.132,65) | (5,48) |
| 2.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.432.988.048.845,20 | 896.401.452.207,71 | (536.586.596.637,49) | (59,86) |
| 2.2.3. | Belanja Modal | 1.090.561.434.298,00 | 977.828.281.539,77 | (112.733.152.758,23) | (11,53) |
| | JUMLAH BELANJA | 6.494.711.413.219,80 | 5.776.925.248.459,35 | (717.786.164.760,45) | (12,43) |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (364.533.302.751,62) | (307.479.919.295,42) | 57.053.383.456,21 | (18,56) |
| 3. | Pembiayaan | 364.533.302.751,62 | 307.479.919.295,42 | (57.053.383.456,20) | (18,56) |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 543.163.302.751,62 | 425.069.919.295,42 | (118.093.383.456,20) | (27,78) |
| 3.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 538.661.342.451,62 | 420.567.958.995,42 | (118.093.383.456,20) | (28,08) |

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1.7. | Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | 4.501.960.300,00 | 4.501.960.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 543.163.302.751,62 | 425.069.919.295,42 | (118.093.383.456,20) | (27,78) |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 178.630.000.000,00 | 117.590.000.000,00 | (61.040.000.000,00) | (51,91) |
| 3.2.2. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 178.630.000.000,00 | 117.590.000.000,00 | (61.040.000.000,00) | (51,91) |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 178.630.000.000,00 | 117.590.000.000,00 | (61.040.000.000,00) | (51,91) |
| | PEMBIAYAAN NETO | 364.533.302.751,62 | 307.479.919.295,42 | (57.053.383.456,20) | (18,56) |
| 3.3 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p>HAMENGGU BUWONO X</p> | | | | | |